

## KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGRI DAN LUAR NEGRI PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN MEGAWATI

---

**Dito Dwi Fernando<sup>1</sup>, Fahrudin\*<sup>2</sup>**

Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta

E-mail: [ditofernando002@gmail.com](mailto:ditofernando002@gmail.com), [fahrudin@upy.ac.id](mailto:fahrudin@upy.ac.id)

Jl. IKIP PGRI 1 Sonosewu No. 117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

---

### **Abstract**

Writing this article aims to: (1) explain domestic political policies, especially in the formation of the mutual cooperation cabinet and the formation of the KPK; (2) explaining how the foreign policy system was during Megawati's presidency; (3) explain the form of foreign policy cooperation between Indonesia and America. The method used in this study is the historical method. The results of this study stated that: (1) the formation of the mutual cooperation cabinet was aimed at overcoming inflation or rising prices of goods during the reign of President Megawati, and the formation of the KPK was aimed at overcoming the dirty institutions of the prosecutors and police at that time. (2) foreign policy during the reign of President Megawati adopted the principle of free and active foreign policy. (3) the form of cooperation between Indonesia and America is action against all forms of terrorism

**Keywords: Megawati, foreign policy, terrorism**

---

### **Abstrak**

Penulisan artikel ini bertujuan: (1) menjelaskan kebijakan politik dalam negeri terutama dalam pembentukan kabinet gotong royong dan pembentukan KPK; (2) menjelaskan bagaimana sistem politik luar negeri pada masa presiden Megawati; (3) menjelaskan bentuk kerjasama politik luar negeri antara Indonesia dengan Amerika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Hasil penelitian ini dikemukakan bahwa: (1) pembentukan kabinet gotong royong bertujuan untuk mengatasi inflansi atau kenaikan harga barang pada masa pemerintahan presiden megawati, dan pembentukan KPK bertujuan untuk mengatasi kotornya institusi jaksa dan polri saat itu. (2) politik luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Megawati menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. (3) bentuk kerjasama antara Indonesia dan Amerika adalah aksi melawan segala bentuk terorisme.

**Kata kunci:** Megawati, Politik Luar Negri, Terorisme

---

DOI : -

Received	:	
----------	---	--

Accepted	:	
----------	---	--

Published	:	
-----------	---	--

Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p>
------------------	---	--



## **1. LATAR BELAKANG**

Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden Indonesia kelima menggantikan Abdurrahman Wahid yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden. Selama dua setengah tahun Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia dan merupakan wanita pertama yang menjadi Presiden di Indonesia (Muttaqien & Dharmaputra, 2013). Megawati terpilih menjadi presiden pada tahun 2001. Karena pada tanggal 23 Juli 2001 MPR secara resmi “melengserkan” Presiden Gus Dur, otomatis wakil presiden Megawati Soekarnoputri naik jabatan untuk menggantikannya. Presiden Republik Indonesia yang ke- 5 adalah Megawati Soekarnoputri (Aruma Nurjannah et al., 2018).

Ada kebijakan politik yang baru dalam pemerintahan Megawati, yaitu memulai berani menjalin kerjasama dan kunjungan dengan negara di luar Amerika. Kunjungan itu merupakan satu kebutuhan dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif (Nurjahan, 2017). Politik luar negeri Indonesia mengedepankan prinsip bebas dan aktif, di mana bebas yaitu Indonesia tidak memihak salah satu kekuatan dunia dan Indonesia juga bebas dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang diambil demi mewujudkan kesejahteraan serta kedaulatan negara Indonesia. Indonesia juga aktif dalam kancah internasional di mana Indonesia ikut andil dalam percaturan politik internasional baik itu membantu menyelesaikan permasalahan internasional maupun ikut membantu menjaga perdamaian dunia (Muttaqien & Dharmaputra, 2013)

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Indonesia mengalami insiden yang cukup menghebohkan yaitu Bom Bali. Bom Bali adalah Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, salah satu wilayah yang terkena serangan aksi terorisme terbesar di Indonesia adalah pulau Bali pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 berupa ledakan bom yang terjadi di Paddy's Pub ,Sari Club (SC) di Kuta, dan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat di Denpasar (Saputra et al., 2018). Dengan adanya Tindakan terorisme tersebut indonesia mulai menjalin kerjasama untuk melawan bentuk-bentuk terorisme salah satunya dengan negara Amerika Serikat

## **2. METODE**

Metode yang digunakan pada penelitian adalah menggunakan metode historis atau sejarah. Pencarian sumber kami menggunakan studi pustaka, atau biasa disebut dengan Library Research yang didasarkan oleh sumber yang berasal dari artikel, buku, hasil penelitian, dan jurnal yang terkait dengan materi (Sutrisno, Nurul Mahruzah, 2022). Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan sumber atau data yang terkait dengan hal yang

didapatkan dalam jurnah ilmiah, artikel, literatur dan karya tulis ilmiah. Studi historis ini dilaksanakn demi mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga penulis memiliki pondasi teori yang kuat untuk membuat artikel ini (Moto, 2019). langkah-langkah yang harus diperhatikan saat penelitian menurut (Kuhlthau, 2002) sebagai berikut ini: Memilih topik, Pembedahan informasi, Penentuan konsep yang diteliti, Mengumpulkan data dan sumber, dan Menyusun laporan.

Sumber yang dijadikan acuan dari penelitian ini didapatkan dari artikel jurnal yang ada di internet, yang berkaitan sesuai topik kami yang telah ditetapkan. Sumber yang dijadikan sebagai rujukan merupakan artikel, tesis, buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan materi (Milla, 2018).

Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dengan cara mencari data mengenai topik yang sedand diteliti yang didapatkan dari buku, catatan, artikel, makalah, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010).

Teknik analisis yang diterapkan pada penulisan ini merupakan metode analisis isi. Teknik ini dipilih supaya memperoleh inferensi yang benar supaya dapat dilakukan penelitian ulang yang berdasar pada konteks (Krippendoff, 1993). Data yang telah dikumpulkn belum mesti seluruhnya dapat dimasukan kedalam artikel dan menjadi jawaban dari permasalahan yang muncul saat penulisan, maka dari itu perlu adanya analisis data kembali yang sudah diklarifikasi. berikutnya bahan-bahan informasi yang diperoleh diatur dan diambil (dikutip) untuk dimasukan kedalam artikel. Dalam langkah terakhir penyusun menulis kembali informasi tersebut dalam bentuk artikel (Mirshad, 2014).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kebijakan Politik Dalam Negri Pada Masa Megawati**

##### **a. Pembentukan KPK**

Salah satu penyokong kelancaran dalam pemerintahan pada masa presiden Megawati sukarno putri adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan pada tahun 2003. Pendirian KPK ini di dasari karena presiden megawati melihat institusi jaksa dan polri saat itu terlalu kotor, sehingga menangkap koruktor tidak mampu, namun jaksa dan polri susah di bubarkan sehingga di bentuklah KPK (Ramadanti, 2021).

Komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan Lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun (Andi Lis Pratiwi, 2015).

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menyangkut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jadi perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia teramat memprihatinkan dan berlangsung dengan cara meluas di kehidupan warga. Perkembangannya tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat dan jumlah kerugian negarapun sangatlah besar dan ini berpengaruh bagi kehidupan perekonomian nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara (Pratiwi, 2015).

Setelah menjabat sebagai presiden Megawati Soekarnoputri menghadapi berbagai persoalan Negara, terutama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sebagaimana amanat Tap MPR No. XI/1998. ketika megawati Soekarnoputri mengumumkan susunan Kabinet Gotong Royong di Istana Negara Jakarta pada hari kamis, 9 Agustus 2001 pukul 11.00 WIB presiden Megawati Soekarnoputri menyinggung program kerjanya yang dikaitkan dengan usaha mewujudkan supremasi Hukum dan tekad menindak para pelaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) (Ackerman, Rose, Susan, 2006).

Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang- undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada KUHP, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus tindak pidana korupsi (Pratiwi, 2015)

#### **b. Pembentukan Kabinet Gotong Royong**

Kekuasaan yang dibentuk oleh megawati pada saat itu adalah kabinet gotong royong sebagai kekuatan di bidang politik dan ekonomi. Kabinet gotong royong di bentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tahun 2004 seiring lengsernya presiden Megawati Soekarno putri pada waktu itu. Kabinet ini dinamakan KGR karena

merupakan pemerintahan dari hasil banyak partai (Ramadanti, 2021). Permasalahan yang harus dihadapi oleh cabinet gotong royong adalah inflasi atau kenaikan harga barang (Pratiwi, 2015).

Inflasi yang di hadapi oleh kabinet gotong royong ini terjadi karena rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah Untuk memperbaiki permasalahan tersebut memang bukan hal yang mudah sejumlah masalah-masalah ekonomi maupun nonekonomi terus membayangi upaya pemulihan ekonomi sejumlah agenda permasalahan yang mesti diselesaikan sebagai prasyarat pemulihan ekonomi antara lain ialah penguatan landasan sektor perbankan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermedias (Gunadarma, 2011).

Dengan waktu yang tersisih semestinya Kabinet Gotong Royong di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri bisa menunjukkan kinerja dimana Megawati Soekarnoputri mampu memperbaiki keadaan Indonesia dari krisis ekonomi. Sekaligus memperbaiki situasi ketidakpastian dan faktor resiko yang masih tinggi. Megawati Soekarnoputri harus memperlihatkan kepada publik langkah yang pasti untuk memulihkan investasi menjadi kondusif, menaikkan produktifitas dan efisiensi, serta membangun stabilitas politik dan keamanan nasional (Pratiwi, 2015).

Untuk menjalankan Roda Pemerintahan masa lalu, kemampuan keuangan negara di masa Megawati Soekarnoputri memang cukup berat. Tetapi upaya mengatasi persoalan masih menimbulkan pro dan kontra yang berkembang menjadi polemik. Untuk menutup bolong keuangan negara, kebijakan ekonomi Megawati Soekarnoputri diimplementasikan dengan melego saham BUMN, mengurus simpanan pemerintah, dan menjual aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (Gautama, 2004).

Untuk membayar hutang Indonesia Megawati Soekarnoputri menempuh kebijakan penjualan beberapa Aset Negara kepada pihak asing, salah satunya menjual Indosat dan Telkomsel, menjual gas alam ke China, termasuk kapal tengker Pertamina, Bank BCA, Bank International Indonesia dan beberapa aset penting lainnya. Penjualan kapal tengker tersebut adalah karena posisi keuangan APBN mengharuskan untuk menarik dana Pertamina, khususnya dari bagian yang belum disetor selama 2 tahun sebesar Rp 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp. 18 triliun. Uang itu untuk menutup defisit anggaran (Fasa, 2003).

## 2. Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Megawati

Didalam kebijakan Politik luar negeri indonesia mengutamakan prinsip bebas dan aktif, di mana bebas berarti indonesia tidak memihak salah satu kekuatan dunia dan indonesia juga bebas dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan negara Indonesia, indonesia juga aktif dalam urusan dunia internasional di mana indonesia ikut andil dalam percaturan politik internasional baik itu membantu menyelesaikan permasalahan internasional maupun ikut membantu menjaga perdamaian dunia (Muttaqien & Dharmaputra, 2013).

Dibawah kepemimpinan Megawati, Indonesia sedang dilanda berbagai ancaman terorisme di beberapa titik di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pada pemerintahan Megawati lebih berfokus pada peningkatan keamanan negara yaitu penanggulangan terorisme (Muttaqien & Dharmaputra, 2013). Tindakan terorisme seperti Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang dinilai tidak kondusif untuk investasi. Banyak negara yang memindahkan (relokasi) investasinya keluar Indonesia dengan alasan keamanan. Hal ini telah memberburuk keadaan ekonomi Indonesia (Wahyuni, 2008).

Bersangkutan dengan adanya peristiwa Bom Bali berdampak langsung pada kondisi investasi, pemerintah mulai melakukan upaya untuk meningkatkan kembali investasi di indonesia. Baik itu domestik ataupun asing. Yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia yang tergolong masih lamban. Misalnya Presiden Megawati Soekarnoputri, dalam berbagai kesempatan telah melobi para kepala negara dan para kepala pemerintahan, agar pengusaha di negaranya mau menanamkan investasi di Indonesia, menghadiri forum-forum bisnis di sela-sela kunjungan di negara- negara sahabat. Disamping itu berbagai promosi untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia (Wahyuni, 2008).

Politik luar negeri dibawah kepemimpinan Megawati menggunakan prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Fokus utama dari politik luar negeri Megawati ialah meningkatkan keamanan nasional dan turut ikut aktif dalam memberantas tindak terorisme di lingkungan internasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk memerangi tindak terorisme di seluruh penjuru dunia (Perikanan, 2018).

### 3. Kerjasama Indonesia Dengan Amerika Dalam Melawan Terorisme

Dengan adanya peristiwa 11 september 2001 banyak menimbulkan perubahan paradigma tentang “keamanan dan ancaman nasional”, terutama bagi negara-negara besar khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Peristiwa ini memunculkan ketegangan antara Amerika Serikat dibawah George W. Bush dengan dunia islam. Ketegangan ini dapat dirasakan dari Penyerangan Amerika Serikat terhadap dua negara yang berpenduduk mayoritas islam, Afganistan dan Irak sebagai aksi pembalasan atas tragedi WTC (Thoiyibi, 2010).

Setahun setelah terjadinya peristiwa runtuhnya Menara kembar WTC, terjadi sebuah tragedy yang memilukan bagi Indonesia yaitu peristiwa Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, kejadian inilah yang membuat megawati membuat Undang-Undang No. 16 tahun 2003 tentang pemberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.(Thoiyibi, 2010). pada kasus bom Bali I yang bermotifkan radikalisme yang bersumber pada faktor agama dan sosial politik hal tersebut dapat dilihat dari pemahaman radikal agama yang dimiliki oleh pelaku yang menganggap pulau Bali sebagai pulau maksiat serta tidak sesuai dengan ajaran agama (Saputra et al., 2018)

Dengan adanya kesamaan permasalahan terorisme yang terjadi. Amerika Serikat berusaha menekan pemerintah Indonesia agar bermain dalam kampanye anti-terorisme. Bahkan kalangan petinggi AS membuka suara agar Washington memberikan bantuan polisi dan militer Indonesia, selain bantuan ekonomi yang selama ini diberikan melalui via IMF dan Faris Club. Dibalik bantuan itu, sebagaimana diungkapkan sejumlah pengamat, AS sebenarnya ingin mengintervensi pemerintah Indonesia agar melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh Islam Indonesia yang seringkali baru atas tuduhan sepihak dan atas bukti-bukti “kemasan” AS yang memojokkan sejumlah tokoh Islam sebagai “aktor teroris” (Romli, 2007).

Dengan adanya kampanye perang melawan teroris, Polri merasa sangat diuntungkan dan menjadikan keadaanya lebih baik, karena banyaknya bantuan dari negara asing sehingga Polri mampu memiliki peralatan muktahir, dan mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam penanganan teroris, dengan suntikan dana juta dolar tersebut membuat Polri semangat melakukan perang terhadap teroris, dan selalu siap mengikuti kepentingan asing, seperti yang menimpa Ustadz Abu Bakar Ba’asyir (Thoiyibi, 2010).



#### 4. SIMPULAN

Dengan adanya kebijakan pembentukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang dibentuk pada tahun 2003. Menjadi langkah menuju upaya pemberantasan korupsi karena adanya institusi jaksa dan polri yang pada saat itu sudah terlalu kotor. KPK telah diberikan amanat melakukan tugasnya yaitu pemberantasan korupsi secara professional, intensif dan kesinambungan. Pembentukan kabinet gotong royong menjadi kekuatan politik pada masa presiden Megawati kabinet ini dibentuk pada tahun 2001 dan berakhir pada 2004. Tugas kabinet gotong royong pada saat itu adalah mengatasi permasalahan inflansi atau kenaikan harga barang. Dalam sistem politik luar negri pada masa megawati, Indonesia mengutamakan prinsip bebas aktif yang berarti indonesia tidak berpihak kesalah satu kekuatan dunia dan indonesia bebas dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan mensejahterakan bangsa indonesia, serta indonesia juga aktif dalam urusan dunia internasional. Bentuk kerjasama politik luar negri adalah kerjasama Indonesia dan Amerika dalam melakukan kampanye melawan terorisme yang ada di dunia. Kerjasama ini terbentuk karena adanya permasalahan yang sama yaitu amerika mengalami terror peristiwa 11 september 2001 dan indonesia juga mengalami tragedi Bom Bali 1 dan 2.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aruma Nurjannah, I. R., Umamah, N., & . M. (2018). Megawati Presiden Political Policy in 2001-2004. *February*, 2(1), 14. [jurnal.unej.ac.id](http://jurnal.unej.ac.id)
- Krippendoff, K. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Citra Niaga Rajawali Press.
- Kuhlthau, C. C. (2002). *Teaching The Library Research*. USA: Scarecrow Press Inc.
- Milla, T. I. (2018). Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Neuro Linguistic Programming (NLP) Dalam Lingkup Pendidikan. *Jurnal BK UNESA*, 8. No. 2.
- Mirshad, Z. (2014). *Motivasi konsumsi Islam versus sekuler: studi komparatif pemikiran Al Ghazali dan Abraham Maslow*. 53–63. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/1359>
- Moto, M. M. (2019). Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dalam Dunia Pendidikan. *Indonesian Journal of Primary Education*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i1.16060>
- Muttaqien, M., & Dharmaputra, R. (2013). *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia*. 5–8.
- Nurjahan, I. R. A. (2017). Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001 – 2004. *Skripsi*, 1–118.
- Perikanan, K. K. dan. (2018). *Perkembangan Politik Luar Negeri Terutama Kerjasama Negara-Negara ASEAN*. from Ropeg KKP: [ropeg.kkp.go.id](http://ropeg.kkp.go.id).
- Romli, I. S. I. A. S. M. (2007). *Terorisme dan Islamophobia: Fakta dan Imanjinasi Jaringan Kaum Radikal*. Nuasa.
- Saputra, N. A. T., Swardhana, G. M., & Wirasila, A. A. N. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Bali. *Binamulia Hukum*, 7(2), 1–15.
- Sutrisno, Nurul Mahruzah, D. N. (2022). Mengembangkan Kompetensi Guru Dalam Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran Di Era Merdeka Belajar. *ZAHRA: Research And Thought Elementary School Of Islam Journal*, 3(1), 52–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/zahra.v3i1.409>
- Thoiyibi, M. (2010). *Kebijakan Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Tentang Terorisme*. 25.
- Wahyuni, K. (2008). *Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri Periode Tahun 2001-*

2004. [https://repository.usd.ac.id/2048/2/031314013\\_Full.pdf](https://repository.usd.ac.id/2048/2/031314013_Full.pdf)